

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peralihan dekade enam puluhan ke dekade tujuh puluhan merupakan perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan ini ditandai dengan perpindahan tatanan negara Orde Lama menuju sistem baru yakni Orde Baru. Saat itu perubahan tersebut merupakan masa depan bagi politik Indonesia. Melalui prosedur konstitusional, setapak demi setapak Soeharto membangun Orde Baru melangkah ke pusat dan puncak kekuasaan. Pada tanggal 11 Maret 1966, Soeharto mendapatkan surat perintah dari Presiden Soekarno yang merangkap menjadi Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.<sup>1</sup> Surat perintah ini bernama Supersemar yang memberi kekuasaan penuh bagi Soeharto untuk memulihkan ketertiban, menjalankan pemerintahan, dan melindungi presiden atas nama revolusi.<sup>2</sup>

Orde Baru ada kaitannya dengan umat Islam disebabkan oleh mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Orde Baru merupakan sebuah harapan bagi umat Islam yang sangat dinantikan, khususnya dalam kaitan politik dan kehidupan bernegara.<sup>3</sup> Orde Baru terbentuk dengan dukungan yang sangat besar dari

---

<sup>1</sup>Inu Kencana Syafi'ie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 48.

<sup>2</sup>M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Yogyakarta: Serambi, 2008), hal. 598.

<sup>3</sup>Okrisal Eka Putra, "Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru", *Jurnal Dakwah* Vol.IX No. 2, Tahun 2008, hal. 185.

kelompok-kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu<sup>4</sup>, termasuk umat Islam sendiri. Apalagi dipenghujung Orde Lama, peran dominan PKI tidak memberikan ruang gerak bagi umat muslim politik dan organisasi Islam untuk menjadi eksis.

Hubungan Islam dan pemerintahan Orde Baru pada mulanya sangat mesra. Ini disebabkan oleh satu kepentingan yaitu pembasmian PKI dari skala lokal hingga skala nasional oleh Soeharto di seluruh daerah. Soeharto berperan sebagai pimpinan tertinggi yang ditugaskan untuk menyelesaikan kekacauan negara. Pemerintah Orde Baru memiliki kepentingan untuk menyeleksi pendukung yang masih loyal dengan Soekarno yang berpaham komunis. Sedangkan umat Islam ingin mereduksi peran dominan PKI. Peranan umat Islam dalam pembasmian PKI dapat dilihat dengan himbauan Muhammadiyah untuk perang sabilillah melawan pendukung komunisme.<sup>5</sup>

Hubungan Islam dan pemerintahan Orde Baru yang awalnya mesra menjadi renggang. Salah satu faktor penyebabnya adalah perbedaan ideologi. Pihak pemerintah memaksakan ideologi Pancasila di Indonesia baik dalam organisasi ataupun politik bernuansa Islam. Sedangkan umat Islam menginginkan diberikan ruang untuk menggunakan ideologi Islam meskipun dalam skala individu ataupun kelompok. Faktor lainnya yaitu kuatnya pengaruh dari rezim Soeharto.

Dimana pemerintah Orde Baru secara bertahap menjadi rezim birokrasi militeristik yang diberi kekuasaan penuh oleh Soeharto.<sup>6</sup> Hal ini dapat dilihat dari

---

<sup>4</sup>M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia.....*, hal. 587.

<sup>5</sup>M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia.....*, hal. 595.

<sup>6</sup>Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta: Obor Indonesia, 2008), hal. 397.

peran dominan ABRI di panggung Orde Baru. Salah satu akibat dari dominannya Soeharto dan ABRI, Islam dianggap ancaman potensial bagi negara. Dampaknya yang terjadi adalah hubungan antagonistik ataupun pertentangan antara Islam dan pemerintah Orde Baru.

Kuatnya pengaruh Pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto tidak hanya mengontrol aktivitas sosial politik khususnya Islam pada masa itu. Akan tetapi, merambat ke ranah lain, salah satunya penulisan sejarah. Tujuan Orde Baru mengendalikan sejarah mencakup dua hal: pertama, mereduksi peran Soekarno dan kedua, membesar-besarkan jasa Soeharto.<sup>7</sup> Sehingga pada satu sisi peran dan keikutsertaan Islam pada masa awal Orde Baru tidak dianggap. Hal ini mengakibatkan penulisan sejarah pada masa Orde Baru identik dengan sejarah yang berada dibawah kendali istana negara. Dampak dari pengontrolan pemerintah Orde Baru ini adalah buku atau artikel yang terbit menyesuaikan penuturan pemerintah khususnya terkait tentang Islam.

Namun, setelah reformasi banyak terbit buku ataupun artikel yang berlawanan dengan sejarah berdasarkan penuturan penguasa Orde Baru. Tulisan-tulisan yang ditulis atau diterbitkan salah satunya membahas tentang hubungan Islam dan negara masa Orde Baru, kekerasan, dan pelanggaran HAM yang dialami umat muslim, aktivis Islam, ulama, serta siapapun yang berani mengkritik Orde Baru. Para penulis memiliki latarbelakang yang berbeda-beda. Ada sejarawan akademik yang memiliki pengetahuan yang diajarkan dalam perguruan tinggi. Ada juga sejarawan amatir, yaitu orang yang memiliki ketertarikan dalam

---

<sup>7</sup>Asvi Warman Adam, "Kontrol Sejarah Semasa Pemerintahan Soeharto", *Jurnal Sejarah* Vol. 10 Tahun 2001, hal. 18.

menulis terutama tentang sejarah. Adapun pengarang topik tentang hubungan negara dan Islam seperti Ricklef, Ahmad Mansur Suryanegara, K.H. Firdaus A.N, A.M. Fatwa, Aminuddin, Kamsi, Abdul Aziz Thaba dan sebagainya.

Informasi tentang hubungan negara dan Islam masa Orde Baru disebutkan dalam buku bab 21 karangan Ricklef “Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008” yang menyatakan bahwa pada masa awalnya hubungan ini sangat mesra untuk mereduksi komunis. Seiring berjalannya waktu, rezim Orde baru sudah tidak memandang komunis sebagai ancaman terbesar bagi keamanan negara. Sebaliknya Orde Baru memandang Islam, khususnya Islam garis keras, sebagai ancaman bagi eksistensi negara. Akantetapi, Orde Baru lebih menggunakan istilah “ideologi impor” yang disebut sebagai Islam radikal.<sup>8</sup> Tahun 1977 pemerintah Orde Baru menahan 185 orang yang dituduh tergabung dalam organisasi teroris Komando Jihad. Jadi, negara membuat organisasi tersebut dengan maksud menghancurkannya.<sup>9</sup> Tahun 1978, pemerintah memulai sebuah program doktrinasi wajib mengenalkan ideologi Pancasila bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk juga pada organisasi Islam. Gerakan ini tentu menjadi pertentangan bagi umat muslim dimana ideologi organisasi yang digunakan adalah Islam. Masih pada tahun yang sama, terjadi penahanan pemimpin-pemimpin, mahasiswa, aktivis, dosen dan organisasi mahasiswa ditutup serta organisasi Islam dilarang.

Selain Ricklef, sejarawan akademik Ahmad Mansyur Suryanegara ikut menceritakan dalam bukunya *Api Sejarah (Jilid II)* bahwa negara juga

---

<sup>8</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia.....*, hal. 629.

<sup>9</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia.....*, hal. 630.

membentuk kelompok penembak misterius atau Petrus. Petrus ini merupakan upaya sabotase terhadap pembangunan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa takut atau *fear strategy* kepada pelaku kriminal. Tidak hanya itu, strategi ini juga dilancarkan untuk menciptakan perubahan demi upaya deparpolisasi<sup>10</sup> ulama pada zaman Orde Baru.<sup>11</sup> Tokoh politik muslim diberikan ruang gerak yang sempit dalam panggung perpolitikan saat itu. Selain itu juga, rezim Orde Baru menangkap aktivis Islam diantaranya Abdul Qadir Djaelani, Sanusi, A.M Fatwa, Barry, dan lain-nya.

Karangan lain tentang Orde Baru juga disampaikan oleh Abdul Gaffar Karim dalam Hendra Juansyah yang menjelaskan rezim itu menciptakan dua kisah yang disebut Eka dan Eki.<sup>12</sup> Dua kisah kembar ini lahir dari tutur kata penguasa di era tersebut. Eki untuk sebutan dizaman Orde Baru yang merujuk pada komunis. Sedangkan Eka adalah sebutan yang menunjuk pada kelompok Islam radikal. Istilah Islam radikal dirujuk pada Islam politik. Dengan istilah inilah, penguasa lebih leluasa melancarkan tekanan pada kekuatan politik. Penguasa juga memanfaatkan, memelihara atau bahkan menciptakan kecenderungan kekerasan dikalangan umat Islam untuk menjaga bahan pasokan

---

<sup>10</sup>Deparpolisasi adalah pembatasan jumlah partai politik. Pengertian deparpolisasi ini merujuk pada pengertian penyederhanaan partai Islam. Beberapa partai politik seperti Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Partai Nahdatul Ulama, Partai Serikat Islam, dan Parmusi digabung menjadi satu partai saja menjadi Partai Persatuan Pembangunan.

<sup>11</sup>Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan NKRI Jilid II*, (Bandung:Surya Dinasti,2016), hal. 487.

<sup>12</sup>Eka dan Eki adalah singkatan dari kata. Eka singkatan dari ekstrim kanan sedangkan Eki singkatan ekstrim kiri. Eki atau ekstrim kiri lebih mengarah pada sebutan kelompok komunis. Eka itu sendiri atau ekstrim kanan ditujukan pada Islam radikal. Istilah Islam radikal sendiri kerap digunakan sangat longgar untuk merujuk juga pada Islam politik.

kisah radikalisme. Ada kisah “Komando Jihad” misalnya serta kisah pembajakan pesawat yang dinisbahkan pada kelompok Islam teroris.<sup>13</sup>

Corak kekuasaan yang dijalankan oleh Orde Baru menjadi objek penelitian yang menarik bagi ilmuwan dalam negeri, luar negeri, maupun sosial masyarakat terutama tentang negara dan Islam. Kebanyakan penelitian kekerasan Orde Baru pada masanya ditulis oleh ilmuwan luar negeri disebabkan oleh ruang gerak yang bebas. Hal ini berbanding terbalik dengan ilmuwan dalam negeri ataupun ditulis oleh orang Indonesia sendiri dimana rezim mencekal tulisan yang berani mengkritik Orde Baru. Kebebasan bagi penulis dalam negeri mendapatkan tempat seluas-luasnya setelah dimulainya era reformasi. Oleh sebab itu, telah banyak karya topik tentang hubungan negara dan Islam yang dilahirkan, baik artikel maupun buku hingga saat ini. Para peneliti atau penulis mempunyai latarbelakang yang berbeda-beda, baik ilmuwan politik, sejarawan akademik, ataupun korban kekerasan Orde Baru.

Beberapa buku menyebutkan Orde Baru banyak melakukan tindak kekerasan dan kebijakan represif terhadap kalangan mahasiswa, masyarakat sipil, aktifis Islam, maupun ulama. Ulama dan aktivis Islam sebagai kalangan yang sangat vokal menyuarakan Islam menjadi sasaran kriminalisasi penguasa. Awalnya pemerintah mengkondisikan sikap ulama dan santri agar mendukung kebijakan dengan diperbolehkannya partai politik Islam memasuki lembaga legislatif. Secara bertahap, mulailah rezim tersebut melakukan berbagai tindakan dwifungsi partai Islam yang membuat gerak langkah ulama dan aktivis Islam

---

<sup>13</sup>Abdul Gaffar Karim dalam Hendra Juansyah, *Abu Bakar Ba'asyir: Konflik Menuju Ba'it ISIS*, (Bayumas: Penulis Muda, 2016), hal. xii-xiv.

dalam politik dibatasi. Pembatasan tersebut dilakukan oleh kelompok yang disponsori oleh Golkar pada juru kampanye partai politik Islam seperti PPP.<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan diatas berbagai karya yang ditulis dan dipublikasikan tentang hubungan negara dan Islam masa Orde Baru. Akan tetapi dalam skripsi ini akan dibahas hubungan Islam dan pemerintahan Orde Baru. Dimana pemerintahan Orde Baru merupakan salah satu komponen dari negara itu sendiri. Hubungan tersebut dibahas dalam bentuk karya autobiografi maupun biografi aktivis Islam.

Ada dua hal yang melatarbelakangi tulisan ini: **Pertama**, hingga saat ini belum ada satu karya yang mencoba melakukan tinjauan historiografis tentang hubungan Islam dan pemerintahan Orde Baru. Beberapa karya menampilkan hubungan negara dengan organisasi Islam. Seperti karya Abdul Gaffar Karim “METAMORFOSIS: Suatu Kajian tentang NU dan politisasi Islam di Indonesia”. Hubungan negara dengan partai politik Islam. Seperti karya Ahmad Syafii Maarif “Islam dan Politik Teori Belah Bambu: Masa Demokrasi Terpimpin”. Buku ini menggambarkan situasi dan kondisi sosial politik Indonesia. Belah bambu mengisyaratkan perlakuan pemerintah dibawah pimpinan Soekarno pada politik Islam berada dibelahan bawah. Sedangkan posisi belahan atas diduduki oleh partai yang mendukung pemerintah kala itu.<sup>15</sup> Hubungan negara antara Pancasila dan Islam, hubungan negara dengan umat Islam. Belum ada kajian historiografi khususnya sikap politik negara masa Orde Baru terhadap Islam yang diwakilkan

---

<sup>14</sup>Edi Sudarjat dalam Abu Bakar Ba'asyir, *Catatan dari Penjara Untuk Mengamalkan dan Menegakkan Dinul Islam*, (Depok: Mushaf, 2006), hal. xxxvi.

<sup>15</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik Teori Belah Bambu: Masa Demokrasi Terpimpin*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hal. xii.

oleh tokoh-tokoh muslim. Seperti A.M. Fatwa, Abu Bakar Ba'asyir, dan Muhammad Natsir. **Kedua**, semangat reformasi yang membuat munculnya sikap kritis ilmuan atau masyarakat khususnya kalangan muslim politik Islam terhadap Orde Baru yang menabukan kekerasan dalam bentuk tulisan.

Secara khusus skripsi ini memfokuskan pada tiga buku, dua biografi yang ditulis oleh pihak sejarawan amatir, media massa, dan satu autobiografi aktifis Islam yang menjadi korban kekerasan Orde Baru. Tiga buku yang ditulis membahas tiga tokoh Islam. Kisah hidup ketiga sosok ini sangat berkaitan dengan sikap politik Orde Baru. Tiga sosok tersebut antara lain **Muhammad Natsir** yang dituturkan oleh tim Majalah *Tempo*, **Abu Bakar Ba'asyir** yang dikisahkan oleh Hendra Juansyah dan **A.M. Fatwa** yang menulis sendiri autobiografinya. Pertama, buku karya A.M. Fatwa yang berjudul *Dari Mimbar ke Penjara*. Kedua, buku tentang sosok ulama yang bernama Muhammad Natsir dengan judul buku *Politik Santun Muhammad Natsir: Diantara Dua Rezim*. Ketiga, buku karangan Hendra Juansyah yang membahas tentang ulama yang fenomenal yaitu Abu Bakar Ba'asyir dengan judul *Abu Bakar Ba'asyir: Konflik Menuju Bai'at ISIS*.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Ada banyak karya dan tulisan yang dihadirkan topik tentang hubungan negara dan Islam masa Orde Baru. Seperti Kamsi, Aminuddin, Abdul Aziz Thaba, Okrisal Eka Putra. Batasan temporal yang digunakan dalam skripsi ini yaitu tahun 1969-1998. Batasan awal tentang hubungan Islam dan pemerintahan Orde Baru yaitu tahun 1966. Latar belakang batasan awal skripsi ini dikarenakan pada tahun tersebut para tokoh-tokoh Masyumi melakukan upaya rehabilitasi partai Islam

tersebut. Salah satu tokohnya yaitu Muhammad Natsir. Akan tetapi, 1966 ABRI menyatakan status partai terlarang Masyumi yang disamakan dengan PKI. Partai ini dianggap oleh Orde Baru telah menyelewengkan Pancasila dan UUD 1945. Batasan akhir tahun 1998 yaitu tanda berakhirnya sistem pemerintahan Orde Baru. Runtuhnya kekuasaan pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto membuka ruang yang lebar bagi siapapun. Termasuk kembalinya Abu Bakar Ba'asyir ke tanah air. Setelah beberapa lama melarikan diri ke Malaysia dari pemanggilan pengadilan pemerintah Orde Baru. Runtuhnya Orde Baru dengan sistem sentralistiknya memberi ruang kebebasan berpendapat baik lisan maupun tulisan bagi Indonesia, khususnya tiga tokoh Islam tersebut.

Namun untuk kajian historiografi, maka skripsi ini fokus pada karya A.M. Fatwa, Hendra Juansyah, dan Majalah *Tempo* terkait sikap politik Orde Baru dengan kisah hidup tiga tokoh Islam. Penulisan ini mulanya membahas riwayat singkat A.M. Fatwa, Hendra Juansyah, dan Majalah *Tempo*. Kemudian dilihat apa yang mereka tulis dalam karya mereka serta alasan yang melatarbelakangi mereka untuk membuat tulisan tersebut.

Agar tidak terjadi kerancuan maka diadakan beberapa pertanyaan sehingga terfokus pada satu titik dengan merumuskan masalah diantaranya:

1. Bagaimana profil singkat A.M. Fatwa, Hendra Juansyah, dan Majalah *Tempo*?
2. Apa yang mereka tulis mengenai hubungan Islam dan pemerintah Orde Baru?

3. Mengapa para penulis tersebut mengungkapkan hubungan tersebut dalam tulisan mereka. Dengan kata lain bagaimana latar belakang sosial politik serta jiwa zaman yang menyebabkan mereka mengungkapkan hubungan Islam dan pemerintahan Orde Baru?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan profil singkat A.M. Fatwa, Hendra Juansyah, dan Majalah *Tempo*
- b. Menjelaskan isi tulisan para penulis tentang hubungan Islam dan pemerintahan Orde Baru terhadap tiga tokoh Islam.
- c. Menjelaskan tujuan para penulis tersebut mengungkapkan hubungan Islam dan pemerintah Orde Baru serta melihat latar belakang sosial politik serta jiwa zaman yang menyebabkan mereka mengungkapkan hubungan Islam dan pemerintah Orde Baru dalam tulisan mereka.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Memberikan gambaran tentang sikap pemerintah dengan Islam masa Orde Baru
- b. Menperdalam pengetahuan penulis tentang kajian historiografi
- c. Menambah dan memperkaya kasanah ilmu pengetahuan terkait historiografi sebagai ilmu tersendiri dari sejarah baik bagi kalangan akademik dan non akademik.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Abdullah dalam makalahnya “Hubungan Agama dan Negara : Konteks Ke-Indonesiaan” membahas bahwa ada tiga aliran terkait tema Islam dan kebangsaan. Pertama, aliran yang menyatakan bahwa Islam tidak hanya mengatur urusan manusia dengan Allah saja. Akan tetapi juga lengkap dalam segala aspek termasuk dalam bernegara. Kedua, aliran yang menegaskan bahwa Islam tidak diwajibkannya membentuk sebuah negara Islam dengan alasan bahwa Nabi Muhammad sama halnya dengan rasul yang lain hanya mengajak manusia pada kebaikan dan tidak pernah dimaksudkan mendirikan dan mengepalai negara. Ketiga, yaitu aliran yang menolak pendapat pertama dan pendapat kedua.<sup>16</sup>

Abdullah juga menegaskan bahwa yang terpenting adalah mengamalkan ajaran dalam Islam itu sendiri. Pembentukan negara Islam secara simbolik itu tidak wajib walaupun dalam perspektif Islam itu merupakan sebuah kewajiban. Hubungan Islam dengan Kebangsaan, Islam dengan Hak Azasi Manusia, Islam dengan Demokrasi sesungguhnya memiliki titik temu yang sama dan sejalan dengan Islam itu sendiri. Abdullah mengungkapkan bahwa ajaran bangsa, hak-hak manusia dari lahir serta ajaran demokrasi ada dalam ayat Al-Qur'an itu sendiri.

Perbincangan agama dan negara tidak hanya dibahas oleh Abdullah saja. Akan tetapi dalam tulisan Masykuri Abdillah dengan judul “Hubungan Agama dan Negara: Dalam Konteks Modernisasi Politik Era Reformasi”. Masykuri menjelaskan dalam konsep sistem ketatanegaraan maupun realitas pada saat ini hubungan antara agama dan negara di Indonesia tetap dalam bentuk *intersectional* atau hubungan persinggungan. Dimana negara dan agama yang berarti tidak

---

<sup>16</sup>Abdullah, ”Hubungan Negara dan Agama ; Konteks Ke-Indonesiaan”, *Jurnal Politik Profetik* Volume 4 No. 2 Tahun 2014, hal. 24.

sepenuhnya terintegrasi dan tidak sepenuhnya juga terpisah.<sup>17</sup> Indonesia yang berideologi Pancasila tidak akan menjadi negara sekuler karena Pancasila dan UUD 1945 mengakui secara eksplisit tentang eksistensi hubungan agama Islam dan negara. Ini dibuktikan dengan adanya adopsi lembaga keagamaan tertentu dalam bernegara. Adopsi nilai serta norma agama dalam kebijakan publik serta sistem nasional secara umum.

Okrisal Eka Putra dalam artikel yang berjudul “Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru” menjelaskan posisi umat Islam dan pemerintah Orde Baru periode pertama adalah pada posisi berhadapan atau *vis a vis*. Hal ini dapat dilihat dengan kasus yang membuat hubungan pemerintah Orde Baru merenggang. Sebut saja peristiwa Tanjung Priok, Lampung, Peledakan Borobudur<sup>18</sup>, dikeluarkan SK No.052/C/Kep/D/1982 yang menyebutkan larangan siswi muslimah menggunakan jilbab pada jam sekolah dan sebagainya. Semua ini disebabkan oleh orang terdekat Soeharto adalah nonmuslim. Namun seiring dengan perubahan yang terjadi hubungan Orde Baru dengan umat Islam mulai mesra. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah memberikan izin diberdirikannya ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia), dibentuknya Majelis Ulama Indonesia sebagai penjemabatan antara Soeharto dan umat Islam. Tidak hanya itu di masa Orde Baru dicabut larangan penggunaan jilbab di sekolah, serta pemerintah melakukan bantuan finansial untuk pembangunan tempat ibadah umat muslim.

---

<sup>17</sup> Masykuri Abdillah, ”Hubungan Agama dan Negara: Dalam Konteks Modernisasi Politik Era Reformasi”, *Ahkam* Vol. XIII No. 2 Tahun 2013.

<sup>18</sup> Okrisal Eka Putra, “Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru”, *Jurnal Dakwah*, Vol. IX No. 2, Juli-Desember 2008, hal. 187.

Henk Schulte Nordholt, dkk. dalam tulisan mereka yaitu *Memikir Ulang Historiografi Indonesia* mengungkapkan tentang arah penulisan sejarah Indonesia era kolonial yang sangat eropasentris. Penulisan Indonesia tersebut dijawab oleh historiografi nasionalis untuk mengarah pada indonesiasentris. Tidak hanya sampai disitu, historiografi pada era Orde Baru lebih berfokus dengan pendekatan sentralistis. Pendekatan tersebut dibuat seiring dengan pendekatan pembangunan yang otoriter untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melaju cepat dan serempak dengan stabilitas politik.<sup>19</sup> Setelah kejatuhan Soeharto sejarah masa Orde Baru tidak lagi bisa dipercaya sehingga muncullah penulisan yang berbeda dengan Orde Baru.

Bambang Purwanto dalam bukunya yang berjudul *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!* menyatakan bahwa adanya kegagalan dan ketidakmampuan tradisi Indonesiasentris menghadirkan masa lalu rakyat secara optimal, sejarah kehidupan sehari-hari, sejarah manusiawi, keragaman eksplanasi, keragaman epistemologi, dan tidak mampu melepaskan jeratan warisan sejarah kolonial serta pandangan bahwa sejarah adalah sejarah politik.<sup>20</sup>

Semua karya-karya diatas membahas tulisan mengenai hubungan negara dan Islam hanya secara umum. Kajian-kajian tersebut membahas mengenai hubungan negara dan Islam dari segi politik ataupun organisasi muslim. Akan tetapi, belum ada tulisan yang mengungkapkan hubungan negara dan Islam secara khusus

---

<sup>19</sup>Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, Ratna Saptari dkk., *Penulisan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: KITLV, 2008), hal. 11.

<sup>20</sup>Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*, (Yogyakarta: Ombak, 2006).

melihat hubungan negara dan Islam terhadap pemuka politik dari tiga tokoh Islam yang menjadi aktor pada masa Orde Baru.

#### **E. Kerangka Analisis**

Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu baik yang sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami seseorang.<sup>21</sup> Sejarah juga mampu menciptakan generalisasi dan mampu mengambil pelajaran.<sup>22</sup> Pengaruh sejarah yang besar membuat para penguasa menggunakannya untuk meneguhkan kekuasaan. Seperti pernyataan Michel Sturmer yang dikutip oleh Asvi Warman Adam “Di Negeri tanpa sejarah, masa depan dikuasai oleh mereka yang menguasai isi ingatan, yang merumuskan konsep dan menafsirkan masa lalu.”<sup>23</sup>

Dalam sejarah terdapat istilah historiografi atau bisa disebut juga dengan istilah pensejarahan.<sup>24</sup> Historiografi memiliki dua pengertian, pertama sebagai langkah terakhir dalam metode sejarah, kedua sebagai bagian dari ilmu sejarah. Dalam skripsi ini yang akan dibahas tentang historiografi sebagai ilmu sejarah yakni akan membahas tulisan-tulisan tentang hubungan Islam dan pemerintahan Orde Baru terhadap tiga tokoh Islam. Nantinya historiografi berusaha membahas siapa penulisnya, apa yang ditulis, dan apa latarbelakang ditulis oleh penulis itu sendiri.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hal. 17.

<sup>22</sup>Rowse, *Apa Guna Sejarah*, (Depok: Komunitas Bambu, 2015), hal. 19.

<sup>23</sup>Asvi Warman Adam, *Pelurusan Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hal. 137.

<sup>24</sup>Arba'iyah Mohd Noor, *Ilmu Sejarah dan Pensejarahan*, (Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hal. 68.

<sup>25</sup>Mestika Zed, *Pengantar Studi Historiografi*, (Padang: P3T Unand, 1984), hal. 16-17.

Historiografi dikatakan juga sebagai produk sebuah kebudayaan yang disebut dengan ikatan budaya (*Cultuur gebundenheid*). Oleh sebab itu, historiografi adalah wakil dari kebudayaan yang mencerminkan realitas dari masyarakat dizamannya.<sup>26</sup> Elemen penting lainnya yaitu ikatan zaman atau *Zeitgeist* serta *Tjidgebundenheid*.<sup>27</sup> Maka dari itu nanti akan dilihat dalam historiografi Orde Baru menitikberatkan tentang biografi penulis, lingkungan sosio-kulturalnya, intelektualnya, dan pengaruh terhadap ragam dan isi dari historiografi yang dihasilkan.<sup>28</sup>

Skripsi ini menggunakan pendekatan teori analisis wacana. Stubbs, sebagaimana dikutip oleh Yoce Aliah Darma mengatakan bahwa analisis wacana adalah kajian dan menganalisis bahasa yang digunakan baik ilmiah, lisan maupun tulisan.<sup>29</sup> Analisis wacana juga sebagai upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari subjek (penulis) yang mengemukakan suatu pernyataan. Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi penulis sehingga bentuk distribusi dan produk ideologi yang disamarkan dalam wacana dapat diketahui.<sup>30</sup> Dalam analisis wacana terdapat AWK atau analisis wacana kritis untuk mengungkapkan hubungan ilmu pengetahuan dengan kekuasaan, untuk mendeskripsikan sesuatu, menerjemahkan, menganalisis, dan untuk mengkritik kehidupan sosial yang tercermin dalam teks. Tujuan dari AWK adalah untuk

---

<sup>26</sup>Mestika Zed, *Pengantar Studi Historiografi.....*, hal. 21.

<sup>27</sup>Mestika Zed, *Pengantar Studi Historiografi.....*, hal. 23.

<sup>28</sup>Mestika Zed, *Pengantar Studi Historiografi.....*, hal. 19.

<sup>29</sup>Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis*, (Bandung: Yrama Widya, 2009), hal. 15

<sup>30</sup>Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana.....*, hal. 49.

mengembangkan asumsi-asumsi yang bersifat ideologis yang terkandung dibalik kata-kata dalam teks dalam berbagai bentuk kekuasaan.<sup>31</sup>

Tulisan ini mengungkapkan deskripsi makna yang ada dalam karya individu maupun institusi media massa bernuasa sikap politik Orde Baru terhadap tiga tokoh Islam. Selain itu juga, kata-kata dalam tiga karya ini juga bisa mengkritik kehidupan sosial Orde Baru yang tercermin dalam teks tersebut. Dalam kondisi tersebut maka bahasa digunakan untuk tujuan dan praktek tertentu.<sup>32</sup>

Buku-buku yang dijadikan sumber rujukan primer terkait tindakan politik Orde Baru terhadap tiga tokoh pemuka Islam. Dimana politik mampu mengarahkan sesuatu sesuai dengan kehendak penguasa. Termasuk juga historiografi dikonfrontasikan nasionalisme dan seringkali ditujukan untuk kepentingan nasional.<sup>33</sup> Seringkali juga historiografi dizaman Orde Baru sangat Indonesiasentris. Konsep ini sebenarnya ditujukan untuk dekolonisasi sejarah penulisan Indonesia yang berpusat pada Netherlandosentrisme.<sup>34</sup> Jadi, penggunaan teori AWK dalam kajian historiografi hubungan antara negara dan Islam bisa dikatakan bahwa teks adalah peristiwa tempat sesuatu yang diceritakan masa Orde Baru.

Penulisan skripsi ini melihat perbandingan biografi tokoh seperti A.M. Fatwa, Abu Bakar Ba'asyir dan Muhammad Natsir. Seperti autobiografi A.M. Fatwa yang mengkritik pemerintah Orde Baru yang ditulis sendiri. A.M. Fatwa

---

<sup>31</sup>Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana.....*, hal. 53.

<sup>32</sup>Eriyanto dalam Tri Rina Budiwati, "Representasi Wacana Gender Dalam Ungkapan Berbahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris: Analisis Wacana Kritis", *Kawistara* Vol. 1 No. 3, 22 Desember 2011, hal. 299.

<sup>33</sup>Taufik Abdullah dan Abdurrahan Surjomiharjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hal. 17.

<sup>34</sup>Sugeng Priyadi, *Historiografi Indonesia*, (Yogyakarta:Ombak, 2015), hal. 109-111.

menggambarkan dalam bukunya tentang pandangannya terhadap pemerintahan Orde Baru melakukan tindakan represif terhadap dirinya. Sedangkan Abu Bakar Ba'asyir tokoh muslim yang merasakan penjara Orde Baru karena sikapnya yang menentang pemerintah dan cenderung menjauhi pemerintah khususnya menolak Pancasila digambarkan dalam biografi yang ditulis oleh Hendra Juansyah. Hendra Juansyah diposisikan sebagai orang lain menggambarkan sikap represif pemerintah terhadap beliau masa Orde Baru. Hendra Juansyah bukan sebagai penggemar fanatik ataupun tidak suka terhadap Abu Bakar Ba'asyir. Biografi Muhammad Natsir juga berbeda perspektif. Jika A.M. Fatwa menuliskan sendiri bagian dari perjalanan hidupnya masa Orde Baru dan Abu Bakar Ba'asyir digambarkan oleh orang lain. Maka Muhammad Natsir digambarkan biografinya oleh sebuah majalah yaitu *Tempo*. *Tempo* sebuah majalah sekuler dan liberal menampilkan biografi sosok tokoh muslim bernama Muhammad Natsir.

A.M. Fatwa dalam bukunya sendiri menggambarkan sikap represif pemerintah terhadap dirinya sendiri. Sikap pemerintah ini juga dilatarbelakangi oleh kritikan A.M.Fatwa terhadap kebijakan politik pemerintah Orde Baru. Biografi Abu Bakar Ba'asyir yang ditulis dalam buku Hendra Juansyah juga menampilkan tindakan represif pemerintah pada beliau karena menolak Pancasila. Sedangkan biografi Muhammad Natsir yang ditulis *Tempo* juga menceritakan Orde Baru yang antikritikan juga mendapat tekanan meskipun bukan dalam bentuk kekerasan fisik. Ketiga tokoh muslim ini masing-masing memperlihatkan hubungan antagonistik dengan pemerintah Orde Baru. Dimana negara masih menganggap Islam memiliki ancaman potensial khususnya ketiga tokoh tersebut.

Skripsi ini akan melihat latar belakang penulis baik institusi bernama *Tempo* ataupun individu yakni A.M. Fatwa dan Hendra Juansyah. Selain itu juga, dibahas mengenai pendidikan, ideologi, kecendekiawanan para penulis. Tidak hanya latar belakang penulis akan tetapi juga jiwa zaman dan jiwa kebudayaan yang mempengaruhi mereka. Terakhir nanti akan dilihat kapan mereka menulis dan tahun diterbitkan untuk menganalisis alasan dibuatnya tulisan tersebut.

## F. Metode Penelitian

Metode penulisan sejarah merupakan alat bagi sejarawan akademik untuk melakukan penelitian sejarah yang mampu dipertanggungjawabkan menurut kacamata ilmiah. Menurut Kuntowijoyo mengatakan bahwa penelitian sejarah mempunyai lima tahapan, yakni: pemilihan topik; pengumpulan sumber(heuristik); verifikasi (kritik sumber baik internal dan eksternal); interpretasi atau penafsiran; dan terakhir yaitu penulisan sejarah atau historiografi.<sup>35</sup>

Skripsi yang berjudul “**Hubungan Islam dan Pemerintahan Orde Baru: Tinjauan Historiografis (1966-1998)**” menggunakan tahapan penelitian dalam metode penelitiannya. Tahapan pertama yakni pemilihan tema. Kemudian ke tahap kedua dengan pengumpulan sumber atau heuristik. Heuristik adalah masalah sejarawan dalam usahanya untuk memilih suatu objek dan mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian.<sup>36</sup> Dalam tahapan pencarian

---

<sup>35</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu.....*, hal. 89.

<sup>36</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Susanto (Jakarta:Universitas Indonesia, 2006), hal. 42.

sumber ini peneliti menggunakan sumber primer maupun sekunder. Sumber primer dengan menelusuri buku yang ditulis oleh A.M. Fatwa yang berjudul *Dari Mimbar ke Penjara: Suara Nurani Pencari Keadilan dan Kebebasan*, Hendra Juansyah dengan bukunya *Abu Bakar Ba'asyir: Konflik Menuju Ba'it ISIS*, dan karangan majalah *Tempo* yakni *Politik Santun Muhammad Natsir: Diantara Dua Rezim*. Buku-buku ini adalah sumber utama tentang sikap politik Orde Baru terhadap tiga tokoh pemuka Islam yaitu Abu Bakar Ba'asyir, Muhammad Natsir dan A.M. Fatwa. Sedangkan sumber sekunder dengan mencari buku yang berhubungan tentang Orde Baru ataupun pendapat penulis lain terkait tiga tokoh pemuka Islam dengan sikap politik Orde Baru terhadap mereka. Selain itu juga, peneliti mencari sumber semisalnya yang membahas terkait historiografi yakni artikel maupun jurnal-jurnal.

Tahap kedua yaitu verifikasi yaitu kritik sumber baik internal dan eksternal. Kemudian lanjut ke tahap interpretasi yaitu penafsiran terkait buku yang diteliti untuk mengungkapkan tujuan penulisan tanpa melihat kebenaran dari tulisan tersebut. Tahapan terakhir yaitu penulisan historiografi dari penelitian yang dilakukan tentang hubungan negara dan Islam masa Orde Baru. Memaparkan bentuk sikap politik Orde Baru terhadap tiga tokoh pemuka Islam.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memiliki fungsi untuk membentuk kerangka pemikiran yang tersistem sehingga mempermudah penulisan sejarah sesuai dengan urutan sesuai dengan urutan peristiwa dan periodisasi. Sistematika ini juga mampu membuat pembaca mengerti dan dapat memahami maksud dan jalan

cerita dari penelitian ini. Penulisan tentang Hubungan Agama dan Negara Masa Orde Baru: Kajian Historiografi di bagi menjadi lima bab diantaranya:

Bab I Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang pentingnya diangkat tema ini. Sehingga mampu dilihat seberapa penting dilakukan penelitian terkait seperti apa sesungguhnya hubungan Negara dan Agama. Kemudian dibuat batasan masalah untuk membuat penelitian ini terfokus pada satu titik dan tidak melebar kemana-mana. Tujuan penelitian serta manfaat juga dihadirkan dalam bab ini.

Bab II berisi tentang gambaran keadaan masyarakat dan perpolitikan masa Orde Baru. Selain itu juga, dideskripsikan juga ikatan zaman dan ikatan kebudayaan masa Orde Baru. Sehingga dikaitkan dengan jiwa zaman dengan buku yang dihadirkan tentang hubungan agama dan negara masa Orde Baru. Ikatan zaman dan kebudayaan ini sangat penting diungkapkan untuk melihat faktor penyebab dan pendorong dihasilkan salah satu produk sejarah.

Bab III memaparkan siapa-siapa saja yang menulis tentang hubungan Islam dan pemerintah Orde Baru. Apa yang ada dalam tulisan mengenai hubungan Islam dan pemerintah yang menyebabkan mulanya mereka seperti itu. Akan disinggung juga tentang biografi dari penulis untuk mengetahui latar belakang penulis baik dari segi pendidikan ataupun pengalaman organisasi yang mendorong mereka untuk menulis buku tersebut.

Bab IV berisi kesimpulan atas penjelasan bab-bab sebelumnya yaitu mengenai hubungan Islam dan pemerintah Orde Baru.